

# **PENGARUH STATUS KEPAILITAN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA/BURUH MENURUT UNDANG- UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

Fitri Dwi Nurmaliza, 22150020. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas, 75 halaman, Tahun 2026

## **ABSTRAK**

Kepailitan perusahaan menimbulkan perubahan mendasar terhadap kedudukan hukum pekerja/buruh, dari subjek hubungan kerja menjadi kreditur dalam proses kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia, pekerja diakui sebagai kreditur preferen yang memiliki hak prioritas atas pembayaran upah dan hak-hak normatif lainnya karena upah bersifat alimenter dan menjadi sumber penghidupan utama bagi pekerja dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pekerja sebagai kreditur preferen dalam proses pemberesan harta pailit serta mengkaji efektivitas perlindungan hak upah pekerja dalam praktik kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kepailitan, KUH Perdata, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, dalam praktik pemenuhan hak upah pekerja masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan boedel pailit, tingginya biaya kepailitan, dominasi kreditur separatis, serta lemahnya konsistensi penerapan prinsip prioritas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan guna menjamin terpenuhinya hak upah pekerja secara adil dan efektif.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Pekerja dan Perlindungan Hukum.

***The Impact of Corporate Bankruptcy Status on the Protection of Workers' Wage Rights Under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU)***

Fitri Dwi Nurmaliza, 22150020, *Legal Studies Program, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities, Dharma Andalas University, 75 Page, Year 2026*

**ABSTRACT**

*Corporate bankruptcy brings fundamental changes to the legal status of workers, shifting their position from parties in an employment relationship to creditors in bankruptcy proceedings. Under the Indonesian legal system, workers are recognized as preferential creditors with priority rights to the payment of wages and other normative entitlements, as wages are alimentary in nature and constitute the primary source of livelihood for workers and their families. This research aims to analyze the legal position of workers as preferential creditors in the distribution of bankruptcy assets and to examine the effectiveness of wage protection in bankruptcy practices. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although workers' rights are normatively protected under the Manpower Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and reinforced by Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, the fulfillment of workers' wage rights in practice remains constrained by limited bankruptcy assets, high bankruptcy costs, the dominance of secured creditors, and inconsistent application of priority principles. Therefore, regulatory harmonization and stronger protection mechanisms are necessary to ensure fair and effective fulfillment of workers' wage rights.*

**Keywords:** Bankruptcy, Workers and Legal Protection.